



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Juli 2019/Periodik - 2018)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)  
**UNIT KERJA** : BADAN RESERSE KRIMINAL  
**SUB UNIT KERJA** : BADAN RESERSE KRIMINAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ANTAM NOVAMBAR**
2. Jabatan : **WAKIL KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL**
3. NHK : **163779**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.850.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 260 m2/60 m2 di KOTA MEDAN ,  
HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 4212 m2 di PURWAKARTA, WARISAN Rp.  
500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 116 m2/116 m2 di BANDUNG, HASIL  
SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 197 m2/197 m2 di BANDUNG, HASIL  
SENDIRI Rp. 2.000.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di BANDUNG, HASIL  
SENDIRI Rp. 550.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 1.298.000.000

1. MOBIL, TOYOTA CAMRY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.  
650.000.000
2. MOTOR, VESPA NEW PX Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.  
48.000.000
3. MOBIL, HONDA ODDYSEY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.  
600.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 735.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 764.673.793**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---



Sub Total	Rp.	6.647.673.793
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.647.673.793

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **31 Juli 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.